



DINAMIKA KONFLIK SOSIAL DI KELURAHAN MANGGARAI – TEBET - JAKARTA SELATAN

Sanra Michico Moningkey¹⁾, Eri R. Hidayat²⁾, Bambang Wahyudi³⁾, Wilopo⁴⁾

^{1,2,3)}Program Studi Damai dan Resolusi Konflik,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

⁴⁾ Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Ada banyak jenis dan ragam gesekan sosial yang sering terjadi di masyarakat, baik dari segi penyebab maupun sumber konflik. Baik kuantitas maupun kualitas konflik cenderung naik. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdapat salah satu wilayah yang rawan gesekan sosial, yaitu Kelurahan Manggarai, sering terjadi gesekan sosial antar kelompok warga. Hal ini mendorong dilakukannya riset untuk mendapatkan keterangan mengenai tata kota dan situasi urban kota, sebab-musabab terjadinya gesekan antar warga, serta solusi apa saja yang sudah dilaksanakan untuk menangani gesekan itu. Oleh karena itu kita harus mengumpulkan keterangan dari subyek primer dan sekunder atau narasumber penelitian tentang perebutan parkir, peredaran narkoba, tidak adanya pekerjaan, kebutuhan makanan, dan tuntutan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif naratif dengan mendeskripsikan semua penyebab dan akar permasalahan tawuran di Manggarai dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh warga setempat adalah dengan membentuk forum-forum yang sudah terbentuk di masyarakat dengan melibatkan Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Selanjutnya diberdayakan pemberdayaan dan pendayagunaan hal-hal yang dapat mendukung kesejahteraan bersama, untuk menciptakan situasi dan kondisi yang normal selamanya.

Kata Kunci: Gesekan sosial, penyebab konflik, kesejahteraan bersama.

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya, sehingga masyarakatnya merupakan campuran dari berbagai macam karakter sesuai dengan asal daerah dan wilayah masing-masing. Hal ini sangat bergantung pada pemerintah dalam mengatur dan menempatkan mereka dalam suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang harmonis agar tidak terjadi konflik sosial yang berujung pada konflik kekerasan. Untuk itu perlu adanya kerjasama antar lembaga dan stake holder serta tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk duduk bersama membahas setiap permasalahan yang muncul. Jenis dan pola konflik masyarakat yang terjadi di Indonesia bermacam-macam jenisnya. Ada gesekan kepentingan antar masyarakat hingga tawuran yang disebabkan oleh isu-isu keagamaan seperti pembuatan gereja, masjid dan Pura, isu misionaris, perbedaan pandangan tentang tauhid, perbedaan mahdzab. Perbedaan pandangan tentang ego etnis, yang menyebabkan hilangnya nyawa, material, dan perasaan. Menurut Karl Marx, konflik merupakan salah satu bentuk pertentangan kelas. Ia juga dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu terjadinya konflik dan perubahan sosial.

Dari hasil rekapitulasi data Sekretariat Nasional Tim Terpadu Penanganan Gesekan Sosial Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (2022), terjadi peningkatan signifikan peristiwa gesekan sosial yang terjadi di Indonesia sebanyak 240 peristiwa dalam tiga tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019, terdapat 31 konflik yang melanda masyarakat.
2. Tahun 2020, jumlah gesekan sosial meningkat secara

signifikan sebesar 71 peristiwa sampai Agustus 2021.

3. Sejak November hingga Maret 2022, ada 138 gesekan masyarakat dengan 8 pemicu konflik utama, yaitu: tawuran antarwarga 36,6 persen, isu keamanan 24 persen, konflik ormas 14,5 persen, sengketa lahan 15,5 persen, isu SARA 6,6 persen, ekses konflik politik 1,9 persen, konflik di lembaga pendidikan 2,8 persen dan kesenjangan sosial 1,9 persen. Kemudian, Kementerian Sosial RI (2020), mencatat ada 194 daerah rawan konflik sosial yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Menurut tim peneliti dari Habibi Centre, gesekan social antar warga selama satu tahun yaitu:

1. Gesekan mayarakat berbasis sapatisme: gesekan masyarakat di Papua, Poso, dan Maluku
2. Gesekan mayarakat etnis: pertikaian di Ambon, Kalteng, dan Kalimantan Barat
3. Gesekan mayarakat idiologis: isu kiri komunis dan kanan radikal
4. Gesekan masyarakat politik: pertikaian karena Pilkades dan pemilihan kepala daerah, isu pemekaran desa, kecamatan, kabupaten di beberapa daerah yang dilanjutkan tawuran
5. Gesekan masyarakat ekonomi: pertikaian antara pencari ikan di Selat Sunda, antar geng, antar kelompok supir, antara lapak jualan
6. Gesekan masyarakat lainnya: tawuran SMA, SMP dan perguruan tinggi

7. Gesekan masyarakat solidaritas liar oleh para perusuh: tawuran antar daerah, antar pendukung sepak bola
8. Gesekan masyarakat terkait agama atau sekte: Isu LDII, MTA dan isu aliran sesat
9. Gesekan masyarakat masalah aturan yang diambil pemerintah: Kenaikan Bahan Bakar , aturan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kebijakan penggunaan gas bersubsidi melon tiga kilogram.

Polemik gesekan masyarakat tidak pernah surut dan layak untuk diteliti adalah konflik sosial di Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Konflik sosial ini sangat bagus untuk diadakan penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan yang selalu menjadi pemicu tawuran di Manggarai.

PERMASALAHAN SOSIAL

Pada dasarnya manusia adalah sebagai bagian dari masyarakat madani yang saling membutuhkan satu sama lainnya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Merujuk pada hal tersebut, gesekan yang terjadi di masyarakat cenderung disebabkan karena perbedaan kepentingan dan ego sentris yang dapat menyebabkan bentrokan langsung yang dapat memiliki tingkat kekerasan.

Ini bisa berupa kekerasan yang tinggi (kekerasan), atau rendah dalam hal non- kekerasan (tanpa kekerasan).

Konflik yang terjadi pada manusia berasal dari berbagai macam penyebab, begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, sehingga sulit untuk menguraikan secara jelas dan rinci sumber-sumber konflik tersebut, hal ini disebabkan

karena sesuatu yang seharusnya menjadi sumber konflik, namun pada kelompok manusia tertentu tidak menjadi sumber konflik, begitu juga sebaliknya, terkadang sesuatu yang sepele dapat menjadi sumber konflik antar manusia, konflik dilatar belakangi oleh perbedaan karakteristik yang dibawa individu dalam sebuah interaksi, perbedaan tersebut antara lain ciri-ciri fisik, intelegensia, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.

Menurut Gillin dan Gillin (1987) konflik merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, budaya dan perilaku. Ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, yaitu:

a. Perbedaan Individu

Perbedaan yang terjadi berkaitan dengan perasaan, pendirian, atau gagasan yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang.

b. Perbedaan Budaya

Kepribadian seseorang dibentuk oleh keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai dan norma yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu baik bagi masyarakat lainnya. Interaksi sosial antar individu atau kelompok dengan pola budaya yang berbeda dapat menimbulkan kesalahpahaman, salah tafsir yang dapat menimbulkan kemarahan dan kebencian, yang berujung pada konflik. Perbedaan Kepentingan Setiap kelompok atau individu memiliki kepentingan yang berbeda dalam mempertahankan kepentingannya, kelompok-kelompok tersebut cenderung saling mengintimidasi satu sama lain, yang dapat menimbulkan konflik.

c. Perubahan Sosial

Perubahan yang terjadi terlalu cepat dalam suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai

dan norma yang berlaku, akibatnya konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat. Misalnya, kaum muda ingin merombak pola perilaku tradisional masyarakatnya, sedangkan kaum tua ingin mempertahankan tradisi nenek moyang mereka, maka akan terjadi konflik di antara mereka.

Hasil penelitian Mulia Astuti (2000), Tumanggor (2004), dan Mu'man dkk (2004), yang dikutip oleh Suradi (2009) menyatakan bahwa terjadinya konflik sosial antar kelompok masyarakat di beberapa daerah di Indonesia dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial dan ekonomi, serta intervensi kepentingan politik. Namun demikian, hasil penelitian-penelitian tersebut belum banyak menyajikan informasi mengenai akar permasalahan yang sebenarnya melatarbelakangi terjadinya konflik sosial. Berbagai alasan yang memicu terjadinya konflik sosial dengan kekerasan antar kelompok masyarakat atau konflik horizontal di beberapa daerah di Indonesia dilatarbelakangi oleh intervensi kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Sementara itu, konflik vertikal semakin banyak terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, bahkan semakin meluas di berbagai daerah di Indonesia sebagai eksese dari demokratisasi yang tidak terkendali.

Terlepas dari berbagai penyebab konflik sosial, terdapat dua dampak dari konflik, yaitu dampak positif atau dampak yang menguntungkan dan dampak negatif atau dampak yang merusak. Dampak positif dari konflik antara lain: konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum diteliti secara menyeluruh; konflik memungkinkan terjadinya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, meningkatkan kekompakan hubungan sosial dalam kelompok, meningkatkan interaksi antar individu; konflik meningkatkan

solidaritas di antara anggota- anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain; konflik merupakan suatu cara untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok; konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma- norma baru; konflik dapat menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat; konflik memunculkan suatu kompromi baru apabila pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang sama.

Sementara itu, dampak negatif dari konflik antara lain: rusaknya hubungan antar individu dan persatuan kelompok, rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa manusia, berubahnya kepribadian individu, dan munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah.

METODE PENELITIAN

Metode yang cocok untuk penelitian ini adalah kualitatif pendekatan naratif untuk memperoleh data. Metode kualitatif dengan pendekatan naratif adalah suatu cara penulisan ilmiah dengan menceritakan hasil yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan selanjutnya ditulis dan dibuat narasi ilmiah.

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menggambarkan secara nyata mengenai gesekan masyarakat di Manggarai - Jakarta Selatan. Subyek penelitian ini adalah: Tentara, Polisi, masyarakat wilayah, SKPD terkait.

Studi secara literature adalah dengan mencari data melalui buku, laporan, dan dokumen selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan mengkaitkan gesekan social di Manggarai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai gesekan masyarakat ini dilakukan di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet. Secara administratif, Kelurahan Manggarai adalah sebuah kelurahan yang masuk dalam wilayah administratif Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Manggarai Selatan di sebelah selatan, Kelurahan Menteng Atas di sebelah barat, Kelurahan Bukit Duri di sebelah timur, dan Sungai Ciliwung di sebelah utara. Secara administratif, Kelurahan Manggarai terdiri dari 12 Rukun Warga. Kantor Kelurahan Manggarai terletak di Perempatan Lapangan Udara Menara. Kelurahan Manggarai memiliki luas wilayah 95,3 hektar dan dihuni oleh penduduk sebanyak 14.261 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 8.715 jiwa (50,15 persen) dan 5.546 perempuan (49,85 persen). Wilayah kepadatan penduduknya 41.312 jiwa/km². Jika dibandingkan dengan kelurahan lain.

Kelurahan Manggarai adalah kelurahan dengan populasi tertinggi di wilayah administratif Jakarta Selatan. Untuk menggambarkan tingkat kepadatan penduduk di Kelurahan Manggarai, masyarakat menggunakan istilah "kepengapan sosial". Akibatnya, banyak masalah muncul di daerah ini, termasuk pemukiman kumuh, tingkat pendidikan yang rendah, banyaknya anak jalanan, terbatasnya lapangan pekerjaan, peningkatan pengangguran, peningkatan jumlah penduduk miskin, dan seringnya tawuran antar individu atau kelompok.

Area Manggarai dan sekitarnya menunjukkan ironi ibu kota. Banyak orang yang tersisih dan akhirnya tergilas di balik kecepatan pembangunan Jakarta. Meskipun berada di pusat kota Jakarta, Manggarai bukanlah pusat peradaban modern. Kaum miskin kota terlibat dalam masalah sosial di Manggarai. Ada berbagai macam cara untuk bertahan

hidup, baik legal maupun ilegal. Ada lingkungan di mana orang mabuk, perdagangan narkoba, dan berbagai kegiatan bawah tanah terjadi. Seiring dengan pertumbuhan ibukota Jakarta, masalah sosial kaum miskin di kota Manggarai semakin kompleks. Pada akhirnya, kemiskinan struktural harus diatasi oleh mereka yang tertinggal dari laju "peradaban modern". Misalnya, karena kedua orang tua mereka sibuk bekerja serabutan untuk mencari nafkah, para remaja kehilangan perhatian dan waktu bersama keluarga. Para remaja akhirnya mencari tempat tinggal baru, menjadi gangster, karena rumah-rumah yang sempit semakin tidak layak huni karena dihuni oleh belasan orang. Ini hanyalah satu bagian dari rantai kemiskinan Desa Manggarai (Prasodjo Imam, 2019). Pemerintah dan polisi melihat proses sosial yang kompleks di pelosok Manggarai, tetapi tidak pernah melakukan penelitian menyeluruh. Seringkali, alasan di balik tawuran Manggarai adalah provokatif.

Hal ini disebabkan oleh proses yang jauh di bawah permukaan yang perlu diperhatikan. Pemerintah dan polisi terus mengemukakan dugaan yang berbeda dari berbagai tawuran yang terjadi di Manggarai tahun ini. Pemerintah mengklaim tawuran Manggarai terjadi karena perebutan lahan parkir. Pada September lalu, polisi mempertimbangkan kemungkinan bahwa tawuran tersebut hanyalah sarana untuk menyembunyikan peredaran narkoba di Manggarai. Selain itu, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Mursidin, menyatakan bahwa pemerintah percaya bahwa ketidaksejahteraan warga Manggarai adalah penyebab tawuran.

Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan memulai program pelatihan cuci steam untuk pemuda Manggarai karena keyakinan bahwa mereka melakukan tawuran karena tidak produktif. Pertemuan dan identifikasi lapangan

dengan pejabat kelurahan merupakan dasar dari program ini. Kelurahan Manggarai memiliki populasi yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari penataan rumah yang padat, sarana pembuangan air dan sampah yang tidak memadai, tempat bermain anak yang tidak ada, sehingga anak-anak bermain di jalanan, dan sejumlah fasilitas lainnya yang tidak tersedia di daerah tersebut. Karena ini, orang membuang sampah dan limbah buah di mana-mana, anak-anak bermain di jalanan, jemuran di depan rumah, bau busuk di mana-mana, dan lingkungan terlihat kotor dan tidak sehat. Kondisi seperti ini akan berdampak pada kesehatan warga dan ketidaknyamanan di lingkungan.

Selain itu, populasinya kurang pendidikan. Informasi dari para tokoh pemuda, masyarakat, dan agama menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat rata-rata adalah sekolah dasar, dan hanya sedikit orang yang lulus sekolah menengah. Pendidikan ini tidak dilanjutkan kembali karena tidak ada biaya dan rasa malas

Selain itu, mereka menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuan mereka. Sebagian besar posisi menerima kandidat dengan pendidikan minimal SMA, tetapi persaingan yang ketat untuk mendapatkan pekerjaan membuat beberapa kandidat dari Kelurahan Manggarai merasa tersisih. Sebaliknya, karena tawuran yang sering terjadi, perusahaan tidak akan menerima karyawan dari Kelurahan Manggarai.

Anggota masyarakat hanya berkumpul di pinggir jalan atau gang untuk kegiatan sehari-hari. Pergi-pergi tanpa tujuan yang jelas. Kondisi ini dengan mudah menyebabkan konflik dan tawuran di antara kelompok masyarakat. Jadi, jika ada anggota kelompok yang menghadapi masalah dengan kelompok

lain, mereka berani menyerang kelompok lain. Situasi seperti ini menunjukkan lingkaran sebab akibat. Pengangguran tinggi menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dan tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya, sehingga jumlah pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Situasi ini dapat menyebabkan tawuran, atau konflik sosial, yang berlangsung lama di antara kelompok masyarakat.

Kepadatan penduduk adalah masalah yang berdampak pada masalah lain seperti banyak rumah petak kecil yang hanya digunakan untuk tempat tidur atau istirahat. Orang dewasa berkumpul di luar rumah atau di ujung gang, yang dapat menampung sepuluh orang, sementara anak-anak hanya berlari di jalan, menambah kepadatan. seperti jalan atau area tertentu dari rumah petak yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan MCK bersama.

Rumah-rumah penduduk yang sempit dengan dapur/area memasak, tempat makan, tempat tidur, dan tempat menyimpan peralatan dapur, pakaian, dll., membuat rumah terlihat pengap dan kumuh. Menurut tokoh masyarakat, bahkan ada dua keluarga yang tinggal di rumah kecil yang sempit. Ini menunjukkan bahwa rumah itu memiliki cukup banyak anggota keluarga. Akibatnya, tidur pun menjadi sulit, dan bergantian tidur adalah satu-satunya cara untuk tenang. Orang tua dan anak-anak tidur di dalam rumah, sementara remaja begadang hingga larut malam hingga dini hari. Setelah orang tua dan anak-anak bangun di pagi hari, remaja kembali ke rumah untuk tidur.

Konsep dasar konflik sosial:

1. Menunjukkan Konflik Sosial

Di Kelurahan Manggarai, ada konflik terbuka. Tawuran antar warga berlangsung secara terbuka dan saling menunjukkan sikap dan tindakan yang menunjukkan pertentangan antar

kelompok masyarakat. Tawuran terjadi kapan saja, siang atau malam. Waktu terjadinya tidak jelas. Salah satu kelompok masyarakat yang bertikai menyerang satu sama lain dengan menggunakan batu, kayu, parang, dan bahan lainnya. Ketika kelompok berhadapan satu sama lain dalam jarak dekat, mereka saling mencaci maki dengan kata-kata kotor dan jorok yang menimbulkan kebencian dan kemarahan. Ketika berhadapan dalam jarak jauh, kelompok-kelompok ini menggunakan ketapel yang terbuat dari batu dan benda-benda lainnya yang tersedia. Dalam taktik perkelahian maju mundur, jika ada komando untuk mundur secara tiba-tiba, salah satu kelompok pasti akan mundur. Sebaliknya, lawan akan menyerang dari depan.

Remaja pengangguran dimotivasi untuk mengumpulkan peralatan yang diperlukan oleh tawuran yang terjadi pada siang hari. Karena para tokoh masyarakat pergi bekerja pada siang hari, situasi dianggap aman untuk melakukan tawuran. Mereka tidak memperhatikan petugas keamanan dari Polsek yang sering datang ke tempat tawuran. Mereka menyatakan bahwa karena Polsek Tebet berada jauh dari tempat tawuran, mereka dapat mengantisipasi tawuran yang berlangsung lama. Polisi Tebet berada di wilayah Tebet. Karena Polsek dan tempat tawuran berjarak sekitar lima kilometer, jika terjadi tawuran antara penduduk Manggarai Atas dan Manggarai Bawah, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pihak kepolisian harus mengumpulkan petugas di kesatuannya sendiri atau meminta bantuan dari Kepolisian Resor Jakarta Selatan sambil menunggu petugas Kelurahan untuk berkumpul.

Kelompok-kelompok yang bertikai membubarkan diri dan kembali ke daerah masing-masing saat petugas keamanan dan pemerintah tiba di lokasi.

Sepertinya tidak ada tawuran yang terjadi selama kurang lebih tiga jam. Untuk sementara waktu, jalan akan ditutup oleh aparat keamanan dan pemerintah, dan mereka akan meminta warga atau tokoh masyarakat untuk membersihkan batu atau benda lain yang digunakan untuk tawuran. Sulit untuk mengumpulkan tokoh masyarakat di siang hari karena kebanyakan dari mereka bekerja atau keluar rumah. Setelah tawuran, biasanya warga dan penegak hukum berjaga-jaga di lokasi selama tiga hari tiga malam. Penjagaan dihentikan ketika kondisi dianggap sudah membaik. Aparat keamanan kembali ke kesatuannya, dan tokoh masyarakat setempat dan aparat menjaga keadaan.

Karena akar permasalahannya tidak jelas, proses terjadinya tawuran dianggap situasional. Orang-orang dari masyarakat dan penegak hukum memberikan informasi ini. Tawuran tidak selalu dikaitkan dengan pihak atau kelompok yang melakukannya. Seringkali, masalah muncul dan ditangani secara spontan, sehingga tawuran dapat pecah dengan cepat karena solidaritas yang tinggi. Atau ada orang yang menggunakan kata-kata kotor atau menyinggung. Tawuran dapat terjadi kapan saja jika semuanya dilaporkan bersama.

Akhir pekan, hari Jumat sore atau Sabtu, adalah hari libur sekolah dan libur kerja, jadi orang biasanya berada di rumah atau berkeliaran. Tawuran bisa terjadi karena hal-hal kecil. Namun, dari Senin hingga Jumat sore, hari-hari tersebut dianggap sebagai hari yang sibuk, permasalahan sepele dilanjutkan saling ejek kata-kata jorok lalu marah.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa konflik sosial tidak terkait dengan sentimen kedaerahan atau SARA; pelaku tawuran diketahui di mana mereka tinggal, seperti yang ditunjukkan oleh kelompok mereka dan

tempat mereka bersembunyi. Namun, kelompok tersebut tidak formal karena tidak memiliki kepengurusan resmi, tidak ada aturan, tidak ada jumlah anggota yang diketahui, dan namanya cenderung sepihak. Warga terdiri dari berbagai etnis dan agama, dan tidak ada pengrusakan tempat ibadah.

Masyarakat tidak berhasil menghentikan konflik yang berlangsung lama di Kelurahan Manggarai. Bahkan dalam waktu satu minggu, konflik terjadi hampir setiap saat. Tokoh masyarakat mengatakan bahwa setiap Sabtu malam dan Minggu malam terjadi tawuran. Ini disebut sebagai budaya

Dengan tawuran yang sering terjadi, masyarakat sudah jengkel dan tidak peduli lagi. Untuk mengatasi masalah ini, telah dilakukan berbagai upaya, termasuk musyawarah antar warga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Selain itu, pendekatan keamanan telah diterapkan, khususnya oleh Kepolisian Sektor Manggarai. Namun, masyarakat mengatakan bahwa tidak ada hari tanpa tawuran. Selain itu, pemerintah telah "kehilangan akal" dalam menangani tawuran di Kelurahan Manggarai. Tawuran selalu muncul di tempat lain dan diatasi.

Menurut informasi yang diberikan oleh tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, penyebab utama tawuran adalah masalah sepele. Karena tawuran terjadi secara tiba-tiba, tidak diketahui siapa yang memulainya dan apa penyebabnya.

Di Kelurahan Manggarai, pola tawuran biasanya terjadi antara kelompok masyarakat yang saling berdekatan atau berseberangan. Peta Tawuran: a. Warga Manggarai sering tawuran di Underpass Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet. b. Warga Menteng Trenggulun sering tawuran di Jalan Raya Menteng Trenggulun. c. Gang Tuyul Rt 05 Rw 07 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. d.

Jalan Tambak, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan.

2. Sumber Konflik

Banyak masalah sosial di Kelurahan Manggarai, termasuk pengangguran tinggi, pemukiman kumuh, pendidikan, dan masalah sosial lainnya. Namun, masalah-masalah ini hanyalah hasil sampingan dari masalah utama, atau akar masalah yang tidak terlihat atau tidak terlihat. Dalam hal konflik yang terjadi di Kelurahan Manggarai, kepadatan penduduk dan kemiskinan adalah dua faktor yang berperan sebagai penyebab dan pemicu konflik sosial.

Ada enam sumber konflik di Kelurahan Manggarai, menurut analisis situasi:

a. Tempat tinggal

Tempat tinggal: Berdasarkan pernyataan seorang tokoh masyarakat dan pengamatan peneliti, banyak rumah tinggal berdesak-desakan, tidak beraturan, dan hanya digunakan untuk beristirahat. Rumah-rumah yang sempit digunakan sebagai dapur untuk memasak, makan, tempat tidur, dan menyimpan peralatan dapur, pakaian, dll. Ini membuat rumah terlihat sumpek dan kumuh. Menurut tokoh masyarakat, bahkan ada dua keluarga yang tinggal di rumah kecil yang sempit. Akibatnya, sulit untuk tidur, dan bergantian tidur adalah satu-satunya cara untuk tenang. Orang tua dan anak kecil tidur di dalam rumah, sementara orang dewasa dan remaja begadang di luar rumah, di gang-gang di mana mereka dapat duduk dan berbicara hingga larut malam. Ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada orang tua dan anak-anak untuk bergantian tidur saat orang tua dan anak-anak bangun di pagi hari. Daerah ini selalu penuh orang karena masyarakatnya.

b. Lingkungan Kumuh

Menurut observasi lapangan, Kelurahan Manggarai memiliki populasi

yang sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh penataan rumah yang padat, fasilitas pembuangan air dan sampah yang tidak memadai, tempat bermain anak yang tidak ada, sehingga anak-anak bermain di jalanan, dan sejumlah fasilitas lainnya yang tidak tersedia di daerah tersebut. Karena ini, orang membuang sampah dan limbah buah di mana-mana, anak-anak bermain di jalanan, jemuran baju bergelantungan di depan rumah, bau busuk di mana-mana, dan lingkungan tampak kotor, kotor, dan kumuh. Kondisi seperti itu jelas mengganggu kesehatan warga dan membuat mereka tidak nyaman di tempat tersebut.

c. Pendidikan

Daerah ini menghadapi masalah pendidikan yang sangat memprihatinkan. Menurut informasi yang dikumpulkan dari tokoh-tokoh pemuda, masyarakat, dan agama. Tingkat pendidikan masyarakat di daerah ini rata-rata sekolah dasar, dan hanya ada beberapa orang yang lulus sekolah menengah. Kondisi kehidupan yang kurang memadai sangat erat terkait dengan tingkat pendidikan ini. Tidak hanya sulit untuk tidur, tetapi juga sulit untuk belajar dengan baik, yang menyebabkan banyak anak putus sekolah. Pengangguran meningkat karena jumlah remaja yang putus sekolah.

d. Banyak Peluang Pekerjaan

Tidak hanya di Kelurahan Manggarai saja, tetapi umumnya, pencari kerja memiliki lebih banyak pilihan daripada kesempatan kerja. Perusahaan atau kantor yang menawarkan pekerjaan menetapkan persyaratan, salah satunya pendidikan. Di Kelurahan Manggarai, pendidikan anak-anak umumnya rendah, hanya ada yang lulus SD dan hanya ada yang lulus SMP dan SMA. Dalam diskusi fokus grup atau fokus grup, informasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama,

aparatur kelurahan, dan peserta lainnya menyebutkan bahwa lowongan pekerjaan umumnya menerima pekerja dengan pendidikan minimal SMA. Dengan keadaan ini, banyak orang tidak memiliki pekerjaan. Situasi ini membuat suasana sekitar panas dan pengap, sehingga konflik kecil dapat berubah menjadi tawuran massal. Tawuran sering membuat banyak perusahaan tidak mau menerima karyawan dari Kelurahan Manggarai.

e. Pengangguran

Di Kelurahan Manggarai, banyak remaja yang putus sekolah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Rata-rata remaja di daerah ini hanya tamat sekolah menengah atas dan tidak melanjutkan sekolah tinggi, dan aktivitas sehari-hari mereka hanya nongkrong di pinggir jalan atau gang. Karena mereka tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan, mereka pergi ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas. Ada banyak pekerjaan, tetapi tidak banyak kesempatan kerja. Mereka tidak pernah bisa belajar karena persaingan yang ketat. Ketika ada pertengkaran atau konflik, mereka mudah tersinggung karena situasi seperti ini. Istilah lain adalah "senasib sepenanggungan". Mereka sangat berkolaborasi satu sama lain, sehingga mereka dapat bersatu untuk menyerang musuh jika ada masalah kecil.

f. Kemiskinan

Kemiskinan turun-temurun ini merupakan lingkaran peristiwa di mana suatu masalah menyebabkan masalah lain. Jika kita melihat fakta di lapangan, kondisi rumah yang sempit membuat belajar menjadi sulit bagi anak-anak. Selain itu, keadaan orang tua yang berpenghasilan tidak stabil karena pekerjaan mereka yang tidak stabil, yang menghambat mereka untuk membiayai pendidikan anak mereka. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang buruk lebih sulit mendapatkan

pekerjaan. Akibatnya, jumlah pengangguran meningkat. Karena ketidaksesuaian antara sebab dan akibat ini, kemiskinan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan banyak keterbatasan, masa depan yang tidak jelas timbul dari infrastruktur, pendidikan, lapangan kerja, dan keterbatasan lainnya. Sangat wajar jika tawuran mudah terjadi dalam keadaan seperti itu. Sering berkumpul hingga larut malam dapat mendorong mereka untuk menonjolkan identitas diri dengan membentuk kelompok atau geng, terutama jika tidak ada kegiatan yang jelas. Di lokasi penelitian, beberapa kelompok diidentifikasi: Anak Manggarai Atas (Gemtas), Anak Manggarai Bawah (Tuyul), Geng Zwembath, Kapuk, Gelatik, Asrama 16, Sawo, Pasipur, Mandala, Ampuh, Blimbing, Galih, dan ABS. Dianggap bahwa kelompok-kelompok ini sering melakukan tawuran. Tetapi itu tidak benar untuk semua geng, karena ada beberapa yang hanya menamai diri mereka berdasarkan nama sekolah, tempat, atau gang.

3. Pemicu Konflik

Tidak ada alasan pasti untuk konflik di Kelurahan Manggarai, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari lapangan dan temuan diskusi kelompok. Menurut tokoh pemuda, konflik disebabkan oleh masalah sederhana seperti saling ejek, saling pandang, dan masalah perempuan; namun, karena mereka berkumpul dalam kelompok, mereka saling bercerita, sehingga masalah menjadi lebih luas. Ini menyebabkan konflik yang berkepanjangan di antara kelompok masyarakat. Tokoh masyarakat setempat juga menyebutkan alasan lain untuk perselisihan, seperti persaingan untuk lahan bisnis, keterbatasan fasilitas sosial, dan kepadatan penduduk. Menurut tokoh agama, narkoba, pengangguran, dan karakteristik masyarakat Manggarai

adalah penyebab konflik sosial. Menurut petugas Dinas Sosial DKI Jakarta dan Ketua Forum Keserasian Sosial, sumber tawuran atau konflik sosial adalah pengangguran, narkoba, dan karakter masyarakat.

Di Kelurahan Manggarai, ada banyak konflik sosial di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Selain informasi dari informan sebelumnya, konflik sosial dapat disebabkan oleh beberapa kondisi dan situasi, seperti pemukiman yang sempit, terbatasnya ruang pertemuan warga, kepadatan penduduk, terbatasnya fasilitas sosial, pendidikan yang rendah bagi sebagian besar warga, pengangguran, peran orang tua sebagai pemicu konflik sosial, rendahnya kesetiakawanan sosial, kemiskinan, geng motor, dan provokator. Penelitian khusus harus dilakukan untuk memperdalam berbagai komponen tersebut.

MENANGANI KONFLIK SOSIAL

Menangani Konflik Sosial: Masyarakat Kelurahan Manggarai tidak berhasil menghentikan konflik sosial yang telah berlangsung sejak lama. Untuk menyelesaikan konflik ini, telah dilakukan berbagai upaya, termasuk musyawarah antar warga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Namun, konflik terus terjadi, dan itu pasti akan terjadi lagi setiap minggu karena konflik sosial antara kelompok masyarakat yang berbeda terus terjadi.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi konflik sosial di Kelurahan Manggarai adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan keamanan: Kepolisian Sektor Manggarai menangani konflik sosial di Kelurahan Manggarai melalui pendekatan keamanan. Polisi berusaha, tetapi tawuran terus terjadi. Akibatnya, masyarakat mengatakan bahwa tidak ada hari tanpa tawuran. Untuk menangani masalah tawuran di

Kelurahan Manggarai, aparat sepertinya "kehilangan akal".

2. Pendekatan Sosial:

Pemda DKI Jakarta menggunakan pendekatan sosial untuk menangani konflik sosial dengan melibatkan instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesejahteraan Rakyat, Kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, akademisi, masyarakat peduli, dan dunia usaha. Kegiatan outbone bertujuan untuk membantu mereka mengenal, bekerja sama, menghormati, dan menghargai satu sama lain sebagai warga masyarakat.

3. Pendekatan Ekonomi

Mengatasi konflik melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), seperti kursus menjahit, sablon, perbaikan AC (AC), dan telepon tangan (HP). Selain itu, untuk mencegah tawuran, beberapa forum didirikan. Ini termasuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kelompok Sadar Masyarakat (Pokdarmas), Forum Anti Kekerasan dan Tawuran (Fakta), Forum Anti Tawuran Warga (Fatwa), dan Komunitas Kampung Aman (KKA). Namun demikian, tawuran masih terjadi hingga hari ini.

4. Pendekatan Pekerjaan Sosial

Dengan Program Keresasian Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia berusaha untuk mencegah dan melindungi kehidupan bersama (kerukunan) di antara orang-orang di tempat tinggal mereka. Ini didasarkan pada persaudaraan sejati, kebersamaan (keguyuban), kesetiakawanan (senasib, sepenanggungan, dan saling setia kawan), dan kesetiakawanan sosial (kekompakan, kesetiakawanan, dan kesetiakawanan). Dalam menangani konflik sosial, Kementerian Sosial berusaha menumbuhkan rasa toleransi,

toleransi, harga diri, dan kedamaian dengan mendirikan monumen perdamaian, jalan setapak, perbaikan jalan lingkungan, MCK, pemagaran taman, pot penghijauan, perbaikan fasilitas olah raga, taman, dan grup musik. Program ini diharapkan dapat menciptakan kehidupan sosial yang harmonis berdasarkan nilai-nilai dasar seperti kebersamaan, toleransi, saling menghargai, dan menghormati melalui pendekatan "manajemen risiko bencana sosial berbasis masyarakat". Namun, konflik sosial di antara kelompok masyarakat muncul kembali tidak lama setelah program ini dimulai.

Berbagai inisiatif dan program belum berhasil menyelesaikan konflik sosial secara permanen. Di Kelurahan Manggarai, ada beberapa situasi dan kondisi yang dianggap tidak mendukung upaya penyelesaian konflik sosial antar kelompok masyarakat, yaitu :

1. Pemerintah masih mengutamakan kebanggaan sektoral dalam menangani konflik sosial. Ini menunjukkan bahwa lembaga pemerintah federal dan pemerintah daerah beroperasi secara mandiri. Tidak ada prosedur yang jelas dan menyeluruh untuk menangani konflik baik dalam pencegahan maupun saat dan pasca konflik, yang menunjukkan bahwa penanganan konflik bersifat sektoral. Tidak ada kebijakan yang sistematis dan terukur karena regulasi bersifat reaktif. hubungan antar kelompok masyarakat kembali muncul.
2. Langkah-langkah yang diambil didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat dan daerah, yang dalam praktiknya menimbulkan keraguan bagi semua

lembaga karena masing-masing memiliki peraturan perundang-undangan yang berbeda.

3. Penanganan konflik sosial tidak didasarkan pada temuan penelitian. Akibatnya, pendekatan tersebut tidak mendasar dan tidak berfokus pada masalah utama, tetapi hanya berfokus pada masalah yang tampak paling nyata.

Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat membacakan ikrar perdamaian untuk mencegah tawuran pada tanggal 29 Oktober 2019. 1. Ikrar tersebut ditandatangani dengan empat hal: Berjanji untuk menghentikan permusuhan dan membantu mencegah konflik dengan pihak berwenang; 2. Mengutuk keras mereka yang melakukan tawuran; 3. Mendukung pencabutan fasilitas dari pelaku tawuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan 4. Meminta penyelidikan menyeluruh tentang sumber masalah. Janji-janji tersebut tidak berhasil karena perselisihan terus berlanjut.

KESIMPULAN

Konflik sosial di Kelurahan Manggarai adalah tawuran atau konflik sosial terbuka antar kelompok masyarakat. Artinya, setiap pihak menunjukkan sikap dan tindakan yang bertentangan satu sama lain. Tawuran terjadi setiap minggu, dan waktunya tidak pasti; itu bisa terjadi siang atau malam.

Tawuran masih belum diketahui penyebabnya. Konflik sosial dimulai dengan hal-hal sederhana seperti saling ejek, saling pandang, dan masalah perempuan dan berawal dari masalah individu. Selain itu, persaingan lahan usaha, pengaruh narkoba, dan pengangguran adalah faktor lain yang memicu konflik sosial. Keamanan, sosial,

ekonomi, dan pekerjaan sosial digunakan untuk menangani. Namun, hasilnya gagal, dan tawuran masih terjadi hingga saat ini.

Dengan mempertimbangkan uraian tersebut, tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik sosial. Untuk menangani masalah ini, digunakan pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pekerjaan sosial. Namun, pendekatan ini tidak efektif, dan tawuran masih terjadi hingga saat ini.

Dengan mempertimbangkan uraian tersebut, berikut adalah tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik sosial di Kelurahan Manggarai:

1. Untuk mengatasi masalah kerawanan sosial, penataan kota harus dilakukan dengan baik dan efektif. Kerjasama antar lembaga, dengan Kementerian terkait lainnya, Pemda DKI Jakarta, dan lembaga non-pemerintah harus dilakukan.
2. Meningkatkan forum masyarakat yang ada melalui kegiatan yang dapat meningkatkan keharmonisan sosial antar kelompok masyarakat.
3. Pemberdayaan dan pendayagunaan sumber kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Unit Peduli Keluarga, dan kelompok sosial lokal.
4. Program transmigrasi bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk yang tinggal di ibukota Jakarta. Untuk mencapai hal ini, Anda harus bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau Kementerian.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial, (2006). Pedoman Kegiatan Pemantapan Kesejahteraan Sosial Korban Bencana Sosial. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
- Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial. (2011). Pemetaan Daerah Konflik Sosial. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
- Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial. (2012a). Indikator Keserasian Sosial. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
- Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial. (2012b). Petunjuk Teknis Bantuan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
- Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial. (2012c). Indikator Keserasian Sosial. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
- Dunn, W. N. (1972). Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar, Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc.
- Abidin, S.Z, (2002). Kebijakan Publik, Jakarta: Pancur Siwah. Creswell, John W. (2014) *Penelitian kualitatif dan desain riset: memilih di antara lima pendekatan*. London: Sage Publications Inc.
- Dwiyanto, A. dkk. (2002). Reformasi Birokrasi Publik, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Ismail, N. (2011). Konflik Agama dan Budaya Lokal. Bandung; Lubuk Agung.
- Lawang, R.M.Z. (2005). Modal Sosial: Suatu Pengantar Perspektif Sosiologi. Jakarta: UI-Press.
- Mulyono, A. (1999). Kamus Besar Bahasa Indonesia Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nuryana, M. dkk. (2005). Rekonsiliasi Konflik Sosial, Jakarta: Pusat Penelitian Masalah Kesejahteraan Sosial - Departemen Sosial.
- Pruitt, D.G, & Jeffrey Z.R. (2009). Teori Konflik Sosial. Jogjakarta; Pustaka Pelajar.
- Sihbudi, R. (2001). Bara dalam Sekam: Mengidentifikasi Akar Masalah dan Solusi untuk Konflik Lokal di Ac.
- Soerjono, S. (1987). Sosiologi. Suatu Pengantar. Jakarta; Rajawali Press.
- Sumodiningrat, G. & Agustian, A.G. (2008). Mencintai Bangsa dan Negara. Jakarta; Arga.
- Suradi, (2009). Masalah Sosial dan Kesejahteraan Sosial jilid 1, Jakarta: P3KS Press.
- Susan, N. (2010). Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta; Kencana Prenada Media.
- Wibawa, S. dkk. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/02/14325611/tawuran-kerap-terjadi-di-manggarai-solusi-nihil-karena-penyebab-tak?>